

KOLABORASI KELEMBAGAAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM OPEN DEFECATION FREE (ODF) DI DESA GUNUNGCUPU KECAMATAN SINDANGKASIH KABUPATEN CIAMIS

Filah Darma Mauludin¹, Arie Budiawan², Rindu Garvera³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia¹⁾²⁾³⁾

e-mail: filahdarmamauludin@gmail.com

Submitted: 10-09-2025, Reviewed: 15-09-2025, Published: 29-09-2025

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi belum optimalnya kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan program Open Defecation Free (ODF) di Desa Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan program Open Defecation Free (ODF) di Desa Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data primer yaitu 6 orang yang diwawancara yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Teknis analisa data dalam penelitian ini yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian yaitu: kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan Open Defecation Free (ODF) di Desa Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis belum optimal. Tantangan dalam kolaborasi program Open Defecation Free (ODF) yaitu dalam hal partisipasi masyarakat dan keterbatasan dana yang dimiliki untuk program jamban bersih bisa menjadi beban pengeluaran daerah bagi keluarga dan akses desa terhadap ketersediaan air bersih yang terbatas yang disebabkan oleh aktivitas beberapa perusahaan yang membuang limbahnya sembarangan.

Kata Kunci: *Collaborative Government, Open Defecation, Desa*

PENDAHULUAN

Dalam menunjang kualitas hidup dan juga kualitas kesehatan masyarakat, sangat penting untuk memperhatikan kualitas sanitasi lingkungannya. Sanitasi menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap kesehatan terutama terkait dengan kesediaan sarana air bersih yang sangat penting untuk kehidupan. Permasalahan terkait dengan sanitasi lingkungan bukan hanya terjadi di negara berkembang saja melainkan juga terjadi di negara-negara maju.

Permasalahan lingkungan terutama sanitasi di Indonesia masih menjadi perhatian pemerintah yang belum mampu untuk dicarikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Di wilayah kota kesulitan dalam penyediaan air bersih karena terkontaminasi limbah dan juga sampah dari aktivitas konsumsi masyarakat. Tidak hanya di wilayah perkotaan, permasalahan sanitasi juga kini terjadi di wilayah

pedesaan salah satunya di Desa Gunungcupu yang mengalami permasalahan terkait dengan penyediaan sanitasi dan air bersih.

Untuk wilayah pedesaan berkurangnya sanitasi air bersih karena aktivitas mempengaruhi kualitas air bersih. Dampak yang ditimbulkan dari pola hidup tidak sehat masyarakat yang masih buang air besar sembarangan yaitu penyakit berbasis lingkungan yang terjadi pada orang sudah terkontaminasi dari tinja tersebut. Adanya penyebaran virus secara cepat dari tinja menimbulkan berbagai penyakit yang menjadi akibat dari sanitasi buruk antara lain penyakit diare, kecacingan, hepatitis A, scabies, trachoma, hepatitis E dan malnutrisi (Ahmadi, A., & Saputra, R. 2021). Sehingga untuk menekan permasalahan buang air besar sembarangan pemerintah mengupayakan program-program untuk menanganinya yaitu melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat dengan pilar pertamanya yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan.

Dengan diluncurkannya program STBM ini merupakan salah satu upaya untuk mensukseskan target yang tertuang didalam program *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2015-2030 yang berisi tentang 17 tujuan, salah satunya adalah tersedianya akses air bersih dan sanitasi, setiap Negara ditargetkan harus mampu mencapai target tujuan SDGs tersebut guna untuk pembangunan secara berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, 2015), serta mensukseskan program BKKBN dengan 8 tujuan program yang salahsatunya adalah menciptakan keluarga peduli terhadap lingkungan dan berperilaku hidup bersih dan sehat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas (BKKBN, 2023)

Open Defecation Free (ODF) merupakan suatu kondisi yang menunjukkan bahwa masyarakat telah melaksanakan sanitasi secara total dengan tidak melakukan Kembali BABS. Suatu desa dapat dikatakan ODF jika 100% penduduk desa sudah tidak BAB sembarangan lagi dan sudah memiliki akses jamban sehat (The Word Bank Group. 2018). *Open Defecation Free* (ODF) saat ini mejadi salah satu dari program pemerintah melalui kementerian Kesehatan. Yang bertujuan untuk membebaskan 100% masyarakat agar tidak melakukan BAB di tempat terbuka, sehingga meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan di masyarakat. Tinja merupakan salah satu bahan sisa dari metabolisme yang telah dibuang oleh tubuh melalui saluran pembuangan akhir atau anus/rectum. Selain itu juga dapat menyebabkan banyak penyakit terutama penyakit pada saluran pencernaan, karena hewan atau binatang yang menjadi faktor penyakit rata-rata menjadikan tinja sebagai makanan, misalnya seperti lalat, serangga, dan lainnya yang kemudian jika hinggap dimakanan yang akan dikonsumsi manusia akan menyebabkan manusia menjadi sakit.

Program Desa ODF (*Open Defecation Free*) menjadi salah satu program di Desa Gunungcupu, yang mana program ini dilakukan karena masih banyaknya masyarakat yang buang air besar sembarangan seperti di kolam (empang-empang),

dll. Sebagaimana data yang terdapat dari Pemerintah Desa Gunungcupu, dari jumlah penduduk sebanyak 8.319 jiwa, serta jumlah Kepala Keluarga sebanyak 2.673 KK. Dari data tersebut yang memiliki jamban keluarga sebanyak 1.550 KK, sehingga sisanya sekitar 1.000 KK belum memiliki jamban keluarga. Berdasarkan data yang ada bahwa program *Open Defecation Free* yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis belum merata secara menyeluruh.

Hal inilah yang memacu pemerintah untuk terus meningkatkan program bantuan pengadaan Jamban dan edukasi Pentingnya mendapatkan status *Open Defecation Free* (ODF) kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesehatan lingkungan yang tentunya berimbas pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sehingga perilaku masyarakat dalam hal ini sangat menjadi hal yang berpengaruh pada status *Open Defecation Free* (ODF) di lingkungan masyarakat (Dinkes Kabupaten Ciamis, 2023).

Berdasarkan dari data jumlah Kepala Keluarga sebanyak 2.673 KK, diantaranya terdapat Keluarga Pra Sejahtera sebanyak 859 KK, Keluarga Sejahtera sebanyak 978 KK, dan Keluarga Sejahtera III Plus sebanyak 37 KK. Adapun jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan BLT sebanyak 1.248 KK. Pendanaan berkaitan dengan *Open Defecation Free* (ODF) di Desa Gunungcupu SPALDS sebesar Rp. 500.000.000 Tahun 2019 Dana dari Provinsi, SPALD sebesar Rp. 485.000.000 Tahun 2022 Dana Alokasi Khusus dari Kabupaten, Sanitasi (Pembangunan Septiktank) mandiri sebesar Rp. 364.000 Tahun 2023 Dana Aspirasi/Pokir, yang dimana dalam hal ini belum terakomodir dari Dana Desa. Adapun jumlah terealisasinya mengenai Prasarana Sanitasi dan Air bersih, terdapat 10 MCK umum, Pengelolaan Air Bersih berjumlah 3, Sumur Gali sebanyak 55, dan Sumur Pompa sebanyak 30.

Adapun hasil pengamatan (observasi) awal penulis di Desa Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis terlihat bahwa keberadaan *Open Defecation Free* (ODF) belum berjalan optimal. Terbukti dengan beberapa indikator permasalahan, sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Hal ini terlihat dari sanitasi yang belum baik.
2. Masih terdapat budaya Buang Air Besar Sembarangan (BABS) ke sungai maupun di kolam. Hal ini terlihat dari kotornya sungai dan kolam.
3. Sebagian masyarakat belum memiliki jamban sendiri. Hal ini terlihat dari sekitar 1.000 KK, yang masih mengandalkan jamban umum.
4. Kurangnya dukungan kebijakan anggaran dari Pemerintah Desa Gunungcupu untuk mengatasi *Open Defecation Free*, sehingga masih menjadi pekerjaan rumah yang harus direalisasikan baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Berdasarkan pada pembahasan latar belakang masalah di atas, maka peneliti memuat rumusan masalah yaitu: Bagaimana kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan program Open Defecation Free (ODF) di Desa Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis? Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu: untuk menganalisis dan mendeskripsikan kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan program Open Defecation Free (ODF) di Desa Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Ansell dan Gash mengistilahkan *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell dan Gash, 2008). *Collaborative governance* merupakan kegiatan atau strategi dalam ranah publik yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk merancang dan melaksanakan suatu kebijakan atau program (Noor, M., Suaedi, F., & Antun, 2022). Kolaborasi tidak dibatasi oleh waktu atau periode tertentu, selama masih ada urusan yang memiliki singgungan atau hubungan dengan pihak lain maka kolaborasi masih sangat diperlukan.

Selanjutnya dijelaskan terkait dengan *Open Defecation Free* (ODF) menurut Permenkes RI No 852/Menkes/SK/IX/2008 bahwa *Open Defecation Free* (ODF) merupakan suatu kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Perilaku masyarakat yang terjaga seakan menandakan bahwa *Open Defecation Free* (ODF) telah tercapai atau memutus rantai turun-temurun terkait pola hidup tak sehat. Masyarakat dapat diposisikan sebagai objek binaan, akan tetapi tuntasnya permasalahan sanitasi lingkungan potensial didominasi oleh faktor kesadaran masyarakat dalam menata perilaku sehari-hari dan proses komunikasi yang terjalin antar pihak pelaksana dengan sasarannya (Arifianty, 2017). Desa *Open Defecation Free* (ODF) adalah desa yang 100% masyarakatnya telah buang air besar di jamban sehat, yaitu mencapai Pilar 1 dari 5 Pilar sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Angkasawati, 2019).

Pengertian Desa menurut Siddiq (dalam Fairus Adira, 2020), Desa ialah suatu area yang memiliki tingkat kepadatan sedikit yang ditempati oleh warga dengan koneksi kemasyarakatan yang berperilaku seragam, rata-rata bekerja di bidang agraria serta cakap berhubungan dengan daerah sekitarnya yang lain. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya (Bintarto, 2010:6).

METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Ulber Silalahi (2016:27) mengemukakan bahwa: “Penelitian deskriptif menyajikan suatu gambaran yang terperinci tentang situasi khusus, setting social, atau hubungan”. Sedangkan kualitatif menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2017:3) adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sumber data primer yaitu 6 orang yang diwawancara yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Teknis analisa data dalam penelitian ini yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas mengenai “kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan program *Open Defecation Free* (ODF) di Desa Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis”. *Collaborative Governance* merupakan konsep dalam suatu manajemen pemerintahan yang dijadikan sebagai proses fasilitasi dan pelaksanaan oleh berbagai institusi baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah secara bersama dan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja (Garvera, Arifin, & Fazrilah, 2021). Dengan begitu berdasarkan teori di atas mampu menjadi pendukung bagi peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan yang meliputi kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi yang akan penulis uraikan sesuai dengan fokus penelitian mengetahui perspektif penerapan strategi dalam mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan bangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

1. Kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan program *Open Defecation Free* (ODF) di Desa Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis

Kejelasan regulasi mengenai Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) mengharuskan bagi setiap desa untuk mengoptimalkan pelaksanaannya. Begitupun dengan Pemerintah Desa Gunungcupu dengan komitmen yang dibuat yaitu transformasi untuk menuju desa dengan status *Open Defecation Free* (ODF). Dengan mengimplementasikan kebijakan dan peraturan yang ketat terkait sanitasi, serta melalui upaya pemberdayaan masyarakat dan penyediaan infrastruktur sanitasi yang memadai, Desa Gunungcupu berhasil menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduknya. Melalui kolaborasi antara pemerintah desa, warga, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, regulasi sanitasi di Desa Gunungcupu tidak hanya memastikan penghentian praktik buang air besar sembarangan, tetapi juga

meningkatkan kesadaran akan pentingnya sanitasi yang baik dan memberikan contoh yang inspiratif bagi desa-desa lain dalam mencapai ODF. Keberhasilan program ODF juga tergantung pada ketersediaan sarana sanitasi yang memadai. Minimnya sarana Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Kolaborasi secara kelembagaan yang kuat mencakup komitmen, kesamaan tujuan, dan harapan untuk peningkatan kualitas Kesehatan dengan memastikan adopsi perilaku sanitasi yang sehat dan membatasi praktik buang air besar sembarangan. Melalui upaya kolaborasi kelembagaan ini, pemerintah dapat mengawasi dan mengatur infrastruktur sanitasi, seperti pembangunan toilet dan sistem pengelolaan limbah, serta menyediakan pendidikan dan sumber daya untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. Pentingnya upaya kolaborasi dalam penanganan masalah sanitasi yang efektif terletak pada kemampuannya untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat, mengurangi risiko penyakit terkait air, dan mempromosikan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta komitmen untuk penegakan hukum yang tegas, regulasi sanitasi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam upaya mencapai status ODF dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Faktor Pendukung Kolaborasi Kelembagaan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan *Open Defecation Free* (ODF) cukup beragam. *Pertama*, dukungan regulasi seperti Undang-Undang No 32 Tahun 2009 memberikan kerangka hukum yang mendukung inisiatif sanitasi dan mendorong perubahan perilaku masyarakat. *Kedua*, keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap proyek, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan, menunjukkan pentingnya partisipasi aktif warga untuk keberhasilan dan keberlanjutan proyek. *Ketiga*, pendidikan dan kampanye kesehatan yang efektif berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sanitasi. *Keempat*, ketersediaan sumber daya, termasuk bahan bangunan dan tenaga kerja, juga memainkan peran penting dalam kelancaran pembangunan infrastruktur sanitasi. *Kelima*, kondisi geografis seperti tanah yang berbatu dapat menjadi hambatan, namun dengan solusi teknis yang tepat, kendala ini dapat diatasi. *Keenam*, dukungan pemerintah desa dan LSM dalam penyediaan dana dan pengelolaan proyek menjamin implementasi yang efektif.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, program ODF di Desa Gunungcupu dapat mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup warga. Dalam konteks keberlanjutan implementasi program, penting untuk mempertimbangkan aspek pemeliharaan dan penggunaan fasilitas sanitasi yang telah dibangun. Regulasi sanitasi yang mencakup pemeliharaan jamban bersih dan sistem sanitasi lainnya menjadi kunci dalam menjaga infrastruktur tersebut agar tetap berfungsi optimal

dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas sanitasi juga menjadi faktor penentu keberlanjutan proyek.

Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah inisiatif yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas sanitasi dan higiene di Indonesia. Program ini bertujuan untuk mengubah perilaku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. STBM terdiri dari lima pilar utama yakni, Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), Cuci Tangan Pakai Sabun, Pengolahan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT), Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT), dan Pengelolaan Air Limbah Domestik Rumah Tangga (PALDRT). Pelaksanaan STBM diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, yang mencakup pedoman pelaksanaan dan strategi nasional untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, meningkatkan kebutuhan sanitasi, dan peningkatan penyediaan akses sanitasi. Program ini sangat penting karena dengan sanitasi yang baik, dapat menurunkan angka penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi.

Penting untuk menyadari bahwa regulasi sanitasi yang efektif tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga melibatkan upaya-upaya untuk mengubah perilaku dan norma-norma sosial terkait sanitasi di masyarakat. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang efektif dan program pelatihan tentang praktik sanitasi yang baik juga harus diintegrasikan dalam regulasi tersebut. Selain itu, keberlanjutan proyek pembangunan jamban bersih juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti perubahan iklim, kebijakan nasional, atau perubahan demografis. Oleh karena itu, regulasi sanitasi yang berhasil harus mampu bersifat dinamis dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal yang mungkin mempengaruhi keberlangsungan proyek. Keterlibatan aktif dan kolaborasi antara pemerintah, LSM, masyarakat lokal, dan berbagai pihak terkait lainnya menjadi kunci dalam mengatasi tantangan dan memastikan keberlanjutan proyek pembangunan jamban bersih di Desa Gunungcupu. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan kolaborasi kelembagaan, Desa Gunungcupu dapat mencapai tidak hanya status *Open Defecation Free* (ODF) yang berkelanjutan, tetapi juga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3. Faktor Penghambat Kolaborasi Kelembagaan

Tantangan dalam kolaborasi program *Open Defecation Free* (ODF) seringkali kompleks dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari sosial, ekonomi, hingga infrastruktur. *Pertama*, dalam hal partisipasi masyarakat, seringkali dalam beberapa kasus terkhususnya Desa Gunungcupu masyarakat di sana belum memahami pentingnya menjaga sanitasi atau kualitas air yang baik untuk kesehatan. *Kedua*,

adalah keterbatasan dana yang dimiliki, biaya pembangunan untuk program jamban bersih bisa menjadi beban pengeluaran daerah bagi keluarga dengan golongan pendapatan rendah karena dalam pembangunan yang dibutuhkan partisipatif warga membutuhkan pengeluaran terhadap program yang besar pula, terlebih lagi tidak semua anggaran desa dapat memberikan subsidi penuh untuk setiap warganya. *Ketiga*, akses desa terhadap ketersediaan air bersih yang terbatas.

Dalam beberapa wilayah, terkhususnya Desa Gunungcupu masalah ketersediaan air bersih yang terjangkau masih menjadi tantangan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah perilaku manusia yang kurang peduli terhadap pengelolaan sumber daya air, seperti kebiasaan membuang sampah langsung ke dalam aliran air. Masalah lain yang turut menyumbang adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dalam pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terutama dalam konteks limbah domestik. Tantangan tersebut memberikan dampak yang serius terhadap kualitas air dan lingkungan secara umum. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya seperti lembaga Peduli Konservasi Alam Indonesia (PEKA Indonesia). Kolaborasi tersebut mencakup upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya air dan lingkungan, serta pengelolaan B3 secara aman dan berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses ini menjadi kunci utama untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan efektif.

4. Dampak dari Kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan program *Open Defecation Free* (ODF)

Kegiatan kolaborasi kelembagaan dalam penanganan masalah sanitasi lokal memiliki dampak yang signifikan terhadap Gerakan masyarakat di Desa Gunungcupu, khususnya dalam upaya mencapai prinsip *Open Defecation Free* (ODF). Kebijakan ini, yang didukung oleh Undang-Undang No 32 Tahun 2009, memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mempromosikan sanitasi yang lebih baik dan mengurangi praktik buang air besar sembarangan. Dengan adanya kebijakan ini, Desa Gunungcupu telah berhasil meningkatkan kepemilikan jamban sehat dari 89,57% menjadi 90,80%, meskipun ada kendala seperti kondisi tanah yang berbatu yang menghambat pembangunan septic tank di beberapa rumah.

Melalui kolaborasi kelembagaan ini juga lebih mendorong partisipasi masyarakat dalam proyek pelaksanaan ODF, mulai dari survei, diskusi dengan perangkat desa, hingga serah terima dengan kader desa, yang semuanya berkontribusi pada kesuksesan dan keberlanjutan proyek. Selain itu, program ODF yang dijalankan oleh pemerintah desa bertujuan untuk menghilangkan kebiasaan buang air besar sembarangan dan meningkatkan kualitas sanitasi, sehingga

diharapkan dapat mengurangi penyakit berbasis lingkungan seperti diare. Kolaborasi kelembagaan dalam program ODF dengan yang kuat dan jelas memberikan arah dan panduan bagi pelaksanaan program dengan menciptakan kerangka kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan ODF.

Dalam kolaborasi pelaksanaan ODF di Desa Guung juga memperhatikan pada kebijakan yang meliputi standar pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan fasilitas sanitasi memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk mencapai lingkungan yang bersih dan sehat. Kolaborasi yang terarah dan inklusif memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung ODF agar terlaksana secara maksimal, membangun rasa kepemilikan lokal, dan mendorong keterlibatan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Namun, dalam mencapai tujuan untuk optimalnya implementasi ODF di Desa Gunungcupu, penting juga untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif melalui kampanye penyuluhan dan edukasi yang didukung oleh kebijakan sanitasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik dan mendorong adopsi praktik-praktik yang bersih dan sehat.

Selain itu, melalui kolaborasi kelembagaan yang bukan hanya unsur Pemerintah Desa dapat mendorong keterlibatan dari komunitas lokal dalam pengambilan keputusan juga dapat memperkuat komitmen jangka panjang terhadap tujuan ODF. Adanya kolaborasi yang terlaksana secara terarah dan bertujuan yang sama memainkan pada peranan untuk menunjang keberlanjutan proyek pembangunan jamban bersih di Desa Gunungcupu. Dengan menyediakan arah, panduan, dan dukungan untuk proyek, serta menciptakan lingkungan sosial yang mendukung perubahan perilaku, kebijakan sanitasi lokal memainkan peran kunci dalam upaya mencapai prinsip *Open Defecation Free* (ODF) dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis bahwa kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan Open Defecation Free (ODF) di Desa Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya belum secara optimal. Keberhasilan program ODF juga tergantung pada ketersediaan sarana sanitasi yang memadai. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan Open Defecation Free (ODF) cukup beragam. Pertama, dukungan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan kerangka hukum yang mendukung inisiatif sanitasi dan mendorong perubahan perilaku masyarakat. Kedua, keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap proyek, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan, menunjukkan pentingnya partisipasi aktif warga untuk keberhasilan dan keberlanjutan proyek. Ketiga, pendidikan dan kampanye kesehatan yang efektif

berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sanitasi. Keempat, ketersediaan sumber daya, termasuk bahan bangunan dan tenaga kerja, juga memainkan peran penting dalam kelancaran pembangunan infrastruktur sanitasi. Kelima, kondisi geografis seperti tanah yang berbatu dapat menjadi hambatan, namun dengan solusi teknis yang tepat, kendala ini dapat diatasi. Keenam, dukungan pemerintah desa dan LSM dalam penyediaan dana dan pengelolaan proyek menjamin implementasi yang efektif.

Tantangan dalam kolaborasi program Open Defecation Free (ODF) seringkali kompleks dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari sosial, ekonomi, hingga infrastruktur. Pertama, dalam hal partisipasi masyarakat, seringkali dalam beberapa kasus terkhususnya Desa Gunungcupu masyarakat di sana belum memahami pentingnya menjaga sanitasi atau kualitas air yang baik untuk kesehatan. Kedua, adalah keterbatasan dana yang dimiliki, biaya pembangunan untuk program jamban bersih bisa menjadi beban pengeluaran daerah bagi keluarga dengan golongan pendapatan rendah karena dalam pembangunan yang dibutuhkan partisipatif warga membutuhkan pengeluaran terhadap program yang besar pula, terlebih lagi tidak semua anggaran desa dapat memberikan subsidi penuh untuk setiap warganya. Ketiga, akses desa terhadap ketersediaan air bersih yang terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A., & Saputra, R. (2021). Status analysis open defecation free (ODF) of land availability and economic status in Sagulung district, Batam city. *Jurnal Kesehatan Ibnu Sina (J-KIS)*, 2(01), 1-7.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arifianty, D. P. (2017). Peran Pemerintah Lokal Dalam Peningkatan Sanitasi Lingkungan Masyarakat: Studi Tentang Keberhasilan Program Open Defecation Free (ODF) Di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(3).
- Astriani, E. (2019). Pelaksanaan ODF (Open Defecation Free) Di Desa Besuki Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek. *Publiciana*, 12(1), 23-39.
- Bintarto, R. (2010). Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya, Ghalia Indonesia Yogyakarta
- BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). (2023). Program Genre dalam Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja Ditinjau dari Aspek Delapan Fungsi Keluarga. Jakarta: BKKBN Pusat.
- Garvera, R. R., Arifin, F. S., & Fazrilah, A. N. (2021). Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa (Studi di Desa Bojongmengger, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3), 502-513.

- Moleong, J. Lexi. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Noor, M., Suaedi, F., & Antun. (2022). Collaborative Governance: Suatu tinjauan teoritis dan praktik. Yogyakarta: Bildung Nusantara.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
- Silalahi, Ulbert, 2016. Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi, Cetakan kesebelas, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sustainable Development Goals. (2023). Panduan Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah. Edisi Revisi 2023.
- The World Bank Group. Verifikasi ODF di Komunitas STBM/TSSM. Diunduh pada 15 Juli 2023. [Online]. Diakses di www.sanitasi-total.org